

Peran dan Gagasan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Resolusi Konflik Aceh

The Role and Ideas of Susilo Bambang Yudhoyono in Aceh Conflict Resolution

***Supriadi¹, Nirzalin², Mursyidin³**

¹⁻³Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

**Email: supriadiankuja959@gmail.com*

Abstract

The Aceh peace achieved in 2005 has become an example for the international community in resolving conflicts using a dialogue approach. Of course, it cannot be separated from the role and ideas of Susilo Bambang Yudhoyono as the president of the Republic of Indonesia at that time. This article aims to describe SBY's role and ideas in Aceh's conflict resolution context. The data in this study are sourced from relevant literature studies and analyzed with a qualitative approach. This study shows that several basic things are important points in the context of SBY's role and ideas in pursuing peace in Aceh. First, peace efforts are based on sincerity and political commitment to end the conflict. Second, the ability to see difficulties during a tsunami becomes an opportunity for peace. Third, the choice of a non-militaristic approach and relying on dialogue. Fourth, courage in taking risks and realizing measurable policies in pursuing peace in Aceh. Apart from that, the commitment to peace from the government and GAM is an important point in the realization of peace in Aceh because the commitment to peace by complying with the points of the agreement has been agreed upon and makes peace continue.

Keywords: *SBY, Roles, Ideas, Aceh Conflict*

Abstrak

Perdamaian Aceh yang berhasil diraih pada tahun 2005 telah menjadi contoh bagi dunia internasional tentang bagaimana menyelesaikan konflik bersenjata dengan pendekatan dialog. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran dan gagasan Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu menjadi presiden Republik Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan lebih lanjut tentang peran dan gagasan SBY dalam konteks resolusi konflik di Aceh. Data dalam penelitian ini bersumber dari kajian-kajian literatur yang relevan. Kajian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal mendasar yang menjadi poin penting dalam konteks peran dan gagasan SBY dalam mengupayakan perdamaian Aceh. Pertama, upaya perdamaian yang di dasarkan pada kesungguhan dan komitmen politik untuk benar-benar mengakhiri konflik. Kedua, kemampuan dalam melihat kesulitan di tengah tsunami menjadi peluang untuk berdamai. Ketiga, pilihan pendekatan non militeristik dan bertumpu pada dialog. Keempat, keberanian dalam mengambil risiko dan realisasi kebijakan yang terukur dalam mengupayakan perdamaian di Aceh. Terlepas pada itu, komitmen perdamaian dari pemerintah dan GAM menjadi poin penting dari realisasi perdamaian Aceh, karena komitmen damai dengan cara mematuhi poin-poin perjanjian yang telah disepakati membuat perdamaian dapat terus bertahan.

Kata Kunci: *SBY, Peran, Gagasan, Konflik Aceh*

A. Pendahuluan

Konflik adalah gejala sosial yang selalu hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat *inheren*. Artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. (Desike, Audia, and Wardani 2021; Gultom and Fauzi 2021). Dalam suatu fenomena konflik, tentu ada hal yang tidak berimbang sehingga muncul suatu pergerakan pertentangan antara kedua pihak, namun resolusi dari konflik itu akan dihadirkan. Resolusi konflik adalah suatu pendekatan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik melalui pemecahan masalah secara konstruktif (Sutrisno et al. 2021). Tujuan utamanya adalah menciptakan perdamaian.

Aceh adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki catatan sejarah panjang tentang konflik, mulai dari pra kemerdekaan Indonesia hingga pasca reformasi (Amin 2018; Ikramatoun and Amin 2018). Salah satu peristiwa konflik yang telah menjadi catatan kelam perjalanan Aceh adalah konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia. Peristiwa tersebut telah membuat masyarakat Aceh tenggelam zona kelam konflik kekerasan. Berbagai literatur telah mencatat bagaimana peristiwa kelam konflik yang berlangsung di Aceh, dan hampir semua literatur yang ada tersebut menggambarkan tentang peristiwa kelam yang dialami oleh masyarakat (Barron, Clark, and Daud 2005; Ishak 2013; Kontras 2006; Lee 2020; Mahjuddin 2012; Marzuki and Warsidi 2011; Usman 2003).

Konflik Aceh yang melibatkan Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia terjadi kurang lebih tiga puluh tahun menurut *International Crisis Group* bersumber dari pandangan tentang kedaulatan Aceh. Dalam laporannya pada tahun 2003, *International Crisis Group* mengklasifikasi level konflik Aceh dalam tiga kategori. Pertama konflik yang didasari oleh visi politik yang saling bertentang di mana Gerakan Aceh Merdeka menganggap bahwa klaim Indonesia atas Aceh sama sekali tidak mendasar karena sejarah mencatat bahwa Aceh tidak pernah takluk pada Belanda sebelum proklamasi kemerdekaan sehingga Aceh merupakan entitas

yang merdeka. Di sisi lain, pemerintah Indonesia beranggapan bahwa Aceh adalah bagian dari Republik Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan. Kedua, konflik yang didasari pada perebutan sumber daya alam di mana Pemerintah Indonesia dianggap telah melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam Aceh tanpa sedikitpun memperhatikan kesejahteraan masyarakat Aceh. Ketiga, konflik yang didasari atas penderitaan, ketidakadilan, dan pelanggaran HAM oleh TNI terhadap masyarakat Aceh karena pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh. Ketiga level konflik tersebut membuat peristiwa konflik yang kemudian berlangsung di Aceh berlangsung lama (Jemadu 2007; Mudjiharto 2020).

Meski konflik Aceh baru berhasil dicapai dengan ditandatanganinya MoU Helsinki pada tahun 2005, namun usaha untuk mewujudkan perdamaian Aceh telah diupayakan jauh sebelum itu. Pada masa orde baru, usaha perdamaian dilakukan dengan pendekatan militer yang akhirnya kontra produktif. Kemudian pada masa reformasi di bawah kepemimpinan masa Presiden B.J. Habibie usaha itu kembali dilakukan dengan pendekatan lebih baik, yaitu dengan meminta maaf kepada seluruh rakyat Aceh dan memberikan keistimewaan bagi Aceh. Namun komitmen damai yang kurang dari kedua pihak (RI dan GAM) membuat usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Selanjutnya pada masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, upaya menuju perdamaian juga terus diupayakan. Namun berbagai upaya yang dilakukan seperti jeda kemanusiaan dan otonomi khusus bagi Aceh juga belum mampu menyelesaikan konflik yang terjadi. Bahkan eskalasi konflik dan kekerasan semakin meningkat ketika Presiden Megawati kembali mengedepankan pendekatan militer dalam menghalau pergerakan Gerakan Aceh Merdeka.

Titik terang perdamaian Aceh baru tampak jelas ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berhasil menggunakan pendekatan *soft power* dalam menyelesaikan konflik yang telah terjadi selama puluhan tahun di Aceh (Djumala 2013; Ilham 2015; Sahlan et al. 2022). Upaya yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden SBY terbilang cukup luar biasa karena SBY sendiri adalah seorang militer, tetapi mampu meninggalkan

pendekatan ala militer dalam mengatasi konflik yang terjadi di Aceh. Menarik kemudian untuk dikaji lebih lanjut mengenai peran dan gagasan-gagasan SBY sebagai presiden kala itu dalam mengurai peristiwa konflik yang melibatkan pemerintah Indonesia dan GAM hingga berbuah perdamaian. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan lebih lanjut tentang peran dan gagasan SBY dalam konteks resolusi konflik di Aceh.

B. Metode

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka, utamanya melalui buku tentang SBY, media cetak, elektronik maupun artikel jurnal yang berkaitan dengan fokus utama kajian ini yaitu tentang peran dan gagasan SBY dalam resolusi konflik di Aceh. Data yang penulis peroleh dari sumber-sumber kepustakaan tersebut kemudian penulis analisis secara kualitatif untuk menemukan peran dan gagasan SBY tentang resolusi konflik Aceh.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Mengubah krisis menjadi peluang

Gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 menjadi peristiwa yang mengawali usaha perundingan damai yang sebelumnya sempat terhenti. Namun di tengah krisis yang disebabkan oleh bencana tsunami yang menimpa Aceh tersebut, menurut Djalal (2008b), Presiden SBY kala itu diam-diam melihat satu peluang, "Mungkinkah tsunami mengakibatkan perdamaian? Mungkinkah penderitaan rakyat yang begitu luar biasa menciptakan dorongan moral dan politik untuk mengakhiri konflik yang sudah 30 tahun membara di Aceh? Mungkinkah dimulai perundingan baru dengan GAM?" (Sodikin 2013). Di tengah usaha *recovery* pasca tsunami, Presiden SBY meyakini bahwa kondisi penderitaan di Aceh akibat peristiwa tsunami membuka peluang untuk perdamaian.

Ketika SBY berkunjung ke Aceh untuk memantau proses penanggulangan bencana tsunami, ia melihat sendiri kondisi di Aceh yang mengesankan. Dalam perhitungan SBY, anggota GAM juga manusia biasa yang tidak mungkin tidak

terketuk hatinya melihat penderitaan rakyat Aceh. SBY memahami sekali bahwa masalah utama mengenai perundingan adalah lemahnya kepercayaan antara Pemerintah Indonesia dan GAM sehingga usaha-usaha perundingan damai yang telah diupayakan beberapa kali mengalami kegagalan.

Usaha yang dilakukan SBY dengan mengubah krisis menjadi peluang dalam konteks merajut perdamaian Aceh terlihat jelas dalam percakapan yang terjadi antara SBY dan stafnya sebagaimana diungkapkan oleh Djalal (2008a) dalam bukunya:

- Staf : “Apakah GAM akan mau menyambut inisiatif Bapak”
SBY : “Belum tentu, Kita harus lihat dulu. Tapi peluang itu ada dan tidak bisa dilewatkan. Nanti sejarah tidak akan memaafkan kita.”
Staf : “Apakah politik domestik akan mendukung? Opini publik dan elite politik di waktu tsunami memang sedang tinggi nasionalismenya dan sangat anti GAM.”
SBY : “Pada awalnya mungkin tidak. Pada saat COHA juga begitu. Tapi semua proses perdamaian kana ada risikonya. Saya yakin, kalau kita menunjukkan bahwa kita tulus dan serius, kalau kita menawarkan *win-win solution*, GAM akan keluar dari kandangnya.”
Staf : “Apakah mereka akan menerima NKRI?”
SBY : “Itu *bottom line* dan harga mati kita. Kita harus coba yakinkan mereka. Teman-teman kita di dunia internasional pasti juga akan membantu. GAM perlu tahu bahwa Otonomi Khusus itu solusi terbaik.”

Dialog tersebut menunjukkan bahwa SBY memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan perdamaian Aceh dan ia memahami betul bahwa krisis yang disebabkan oleh tsunami dapat menjadi pintu masuk untuk mewujudkan hal tersebut.

Presiden SBY di bantu Wapres Jusuf Kalla, sudah aktif membuat rencana yang menghidupkan proses perdamaian Aceh. Karena tidak ada tanda-tanda GAM akan mengulurkan tangan, maka SBY memutuskan untuk memulai terlebih dahulu dengan orang kepercayaannya menemui salah satu petinggi GAM untuk membangun kepercayaan. Ketika pihak GAM menanggapi secara positif apa yang coba dibangun oleh pemerintah SBY melalui orang kepercayaannya tersebut barulah kemudian ia menginstruksikan agar TNI menghentikan segala kegiatan

.....

militer terhadap GAM dan berusaha memusatkan perhatian kepada operasi kemanusiaan untuk menolong korban tsunami. Dalam waktu yang bersamaan, SBY menyerukan kepada GAM untuk menghentikan permusuhan dan bersama-sama menolong rakyat yang sedang menderita. Hal ini kemudian berhasil membuka lembaran baru usaha perdamaian Aceh yang sebelumnya sempat terhenti.

b. Pendekatan Informal dan Komunikasi Politik

Pendekatan *soft power* dalam mengatasi konflik Aceh yang dipilih oleh SBY merupakan langkah revolusioner karena fakta mencatat bahwa pendekatan militer bukan saja kontradiktif tetapi malah semakin memperparah konflik dan membuat GAM semakin kuat. Dalam menjalankan misi perdamaian melalui pendekatan *soft power* ini SBY bersama JK secara intens membangun komunikasi politik secara informal. Hal ini dilalukan dengan mengirimkan orang-orang kepercayaannya untuk berkomunikasi dengan para petinggi GAM. Komunikasi politik informal yang dibangun tersebut terbilang sukses karena pihak GAM kemudian membuka diri untuk berdialog. Pembicaraan informal antara Pemerintah Indonesia dan GAM kemudian dapat berlangsung dan difasilitasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI), yaitu sebuah lembaga perdamaian yang di pimpin mantan Presiden Finlandia Martti Ahtiaari. Proses komunikasi tersebut kemudian berlangsung di 'Koenigstedt Estate' yang terletak di luar Ibukota Finlandia Helsinki (Supriyanti 2006).

Pendekatan informal dan komunikasi politik dalam bingkai *soft power* untuk Aceh sejatinya merupakan suatu proses yang panjang, di mana untuk masuk ke lini utama aktor GAM, Jusuf Kalla menugaskan Farid Husein sebagai orang kepercayaannya (Saprianingsih 2011; Tempo.co 2021). Proses ini di sebut sebagai proses mencari bibit perdamaian dalam rangka menumbuhkan kepercayaan antara Pemerintah Indonesia dengan pihak GAM. Dari liku-liku proses untuk membangun kepercayaan dengan pihak GAM, dapat digaris bawahi bahwa proses *trust building* adalah suatu proses yang sangat penting bagian dari komunikasi sosial dan politik dengan pihak GAM kala itu. Melalui pendekatan ini minimal dapat di petakan tiga upaya konsensus normatif. Pertama, melalui komunikasi

sosial dapat di petakan bahwa tuntutan politik kelompok GAM, respons GAM terhadap langkah-langkah yang di tempuh oleh Pemerintah RI, dan harapan-harapan kelompok GAM. Kedua, adanya komunikasi personal antara pihak GAM dengan pemerintah RI sehingga masing-masing pihak memahami pemikiran dan solusi yang akan di gunakan saat perundingan terjadi. Ketiga, adanya kepercayaan antara pihak berseteru baik GAM maupun Pemerintah RI.

c. Komitmen Damai dari Presiden SBY

Faktor kesungguhan dan komitmen politik dari Presiden SBY menjadi salah satu faktor penting bagi terjadinya dialog antara Pemerintah Indonesia dan GAM di Helsinki. Sejak putaran pertama hingga kelima sampai ditandatanganinya MoU Helsinki antara RI-Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005, Presiden SBY telah memberikan kepercayaan penuh pada Wapres Jusuf Kalla untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan proses perundingan dengan pihak GAM. Bagaimanapun komitmen SBY-JK amat besar pengaruhnya bagi proses perundingan di Helsinki, karena secara politik merekalah yang menjadi faktor penentu dari proses integrasi politik di Aceh, khususnya dalam mendorong terjadinya perundingan sebagai pintu awal (Nurhasim 2007). Mengenai komitmen tersebut Farid Husein sebagaimana dikutip Nurhasim menyampaikan:

“Dalam sewaktu kesempatan setelah tsunami, saya memasukkan secara rahasia Damien Kingsbury yang menjadi penasihat GAM ke Jakarta karena yang bersangkutan dicekal tidak boleh masuk ke Indonesia. Setelah bertemu dengan Yusuf Kalla, Damien mengatakan tidak bersedia membantu untuk menekan pihak GAM agar mau berunding. Oleh Yusuf Kalla dikatakan bahwa, ok kalau begitu, saya akan katakan kepada dunia bahwa yang membunuh rakyat Aceh adalah anda, karena anda tidak mau membantu untuk membujuk tokoh-tokoh GAM bersedia berunding” (Nurhasim 2007)

Meskipun kutipan di atas pernah dibantah oleh JK, namun pada akhirnya ruang dialog antara pemerintah RI dan GAM memang kembali terbuka. Untuk menunjukkan komitmen damai yang diperankan oleh SBY dan wakilnya JK, berikut ini penulis gambarkan skema penyelesaian konflik Aceh mulai dari Habibie hingga Megawati.

Skema Penyelesaian Konflik Sebelum Perundingan Helsinki

Periode Pemerintahan	Kebijakan Penyelesaian Konflik Aceh	Hasil / Dampak
Presiden B.J. Habibie (1998-1999)	Kombinasi pendekatan, antara operasi keamanan dengan kebijakan politik	Sebagian besar operasi keamanan yang dilakukan tidak efektif mengurangi atau menghambat pertumbuhan GAM. Kebijakan politik 10 program B.J Habibie untuk Aceh tidak dapat dilaksanakan karena yang bersangkutan hanya kurang dari satu tahun Presiden.
Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jeda Kemanusiaan 2. Inpres No. IV/2001 untuk penanganan masalah konflik Aceh 3. Otonomi khusus bagi Aceh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langkah dan janji B.J Habibie tidak diteruskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. 2. Jeda kemanusiaan tidak efektif untuk menghentikan kekerasan.
Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otonomi khusus Aceh melalui UU No. 18/2001 2. Inpres No. VII / 2001 tentang penanganan masalah konflik Aceh 3. Lahirnya COHA 4. Darurat militer di Aceh, Keppres No. 28/2003 dan Keppres No. 43/2004 5. 6. Darurat sipil di Aceh Inpres No. 1/2004 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian otonomi khusus tidak dapat meredam tuntutan kemerdekaan dari GAM, karena GAM tidak dilibatkan. 2. Inpres No. VII/2001 tidak jalan maksimal, karena tidak jadi dasar utama dalam COHA 3. COHA gagal karena Pemerintah Republik Indonesia memandang hanya menguntungkan GAM 4. Operasi terpadu gagal, karena lebih menitikberatkan pada operasi militer.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa upaya penyelesaian konflik di Aceh kurang efektif karena menggabungkan antara pendekatan militer dan pendekatan dialog. Dalam konteks tersebut, setidaknya terdapat tiga hal utama yang melatarbelakangi gagalnya proses perundingan damai. Pertama, upaya penyelesaian konflik di Aceh lebih dominan dengan cara-cara militer dari pada

non-militer. Kedua, para elite politik (khususnya Presiden) kurang percaya dengan cara dialog untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Ketiga, pemerintahan sipil lemah dalam mengawal proses penyelesaian konflik di Aceh, dalam hal ini pengawalan konflik di Aceh lebih dominan oleh kelompok militer. Berbeda dengan itu, pola pendekatan yang dilakukan SBY yang lebih mengedepankan dialog dan menghindari model pendekatan militeristik ternyata lebih membuahkan hasil. Hal ini tentu dapat dipandang sebagai komitmen damai yang kuat dari Presiden SBY kala itu karena sejatinya Ia adalah presiden yang berasal dari militer tetapi lebih memilih tindakan non militer dalam menyelesaikan konflik Aceh..

d. Berani Mengambil Risiko

Kapasitas seorang pemimpin dapat diukur dari kemampuannya dalam membuat keputusan yang berani dan memperhitungkan segala risikonya. Dalam konteks konflik Aceh dan penyelesaiannya, Presiden SBY termasuk dalam kategori pemimpin yang sangat berani. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari dua keputusan besar terkait proses perdamaian Aceh yang diambil oleh SBY. Pertama, SBY mengambil keputusan yang sangat strategis ketika tsunami melanda Aceh yaitu membuka Aceh secara total pada dunia luar, baik militer maupun LSM. Presiden SBY di depan wartawan nasional dan internasional menghimbau dunia agar menunjukkan “solidaritas global” terhadap para korban tsunami, bukan hanya di Indonesia, namun juga di negara-negara lain di sekitar Samudra India (Miftah Fauziah 2018; Sodikin 2013). Keputusan ini terbilang berani karena dengan kebijakan tersebut maka Aceh yang sebelumnya tertutup bagi dunia luar menjadi terbuka dan ini juga membuka peluang bagi dunia luar untuk terlibat dalam proses sosial yang terjadi di Aceh, termasuk dalam hal konflik Aceh. Namun keputusan ini membuahkan hasil yang cukup menggembirakan karena kehadiran dunia luar tersebut turut memberikan perhatian terhadap dinamika konflik yang terjadi sehingga upaya perdamaian turut mendapat dukungan global.

Keputusan kedua yang terbilang cukup berani adalah keputusan SBY untuk memulai kembali perundingan dengan GAM yang sebelumnya sempat gagal. Kegagalan perjanjian Tokyo dan kembalinya operasi militer di Aceh pada tahun

2003 sebenarnya menandakan gagalnya usaha perundingan damai antara Pemerintah Indonesia dan GAM. Kegagalan ini sekaligus telah menutup pintu dialog antara dua belah pihak. Tetapi, meski telah tertutup rapat, SBY tetap berusaha kembali untuk membunya meskipun keputusan tersebut mengandung berbagai risiko besar seperti risiko di tolak GAM, risiko perundingan gagal lagi, dan yang lebih besar adalah risiko bahwa usaha tersebut ditentang aktor-aktor politik dalam negeri dan pihak militer karena lebih mengedepankan dialog dari pada pendekatan militer. Namun, risiko tersebut tetap diambil hingga kemudian dapat menghasilkan perdamaian bagi Aceh.

e. Gagasan dalam Resolusi Akar Masalah

Salah satu perbedaan penyelesaian konflik Aceh di masa lalu dengan di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla adalah pandangan pemerintah tentang akar masalah konflik, dan strategi untuk menyelesaikannya. Pendekatan penyelesaian konflik Aceh yang dipraktikkan pada masa lalu, khususnya di masa Orde Baru dalam bentuk operasi militer ternyata tidak membuat konflik selesai. Namun sebaliknya, perlawanan GAM justru tumbuh silih berganti. Maka cara pandang Pemerintah SBY-JK berbanding terbalik mekanisme yang pernah dipraktikkan sebelumnya yaitu dengan menggunakan cara berdialog, komunikasi tatap muka, non-kekerasan, dan pemberian kompensasi ekonomi sehingga persoalan Aceh akan tuntas. Dengan kerangka berpikir seperti itu, proses perundingan damai antara pemerintah RI dan GAM dapat terwujud.

Kemampuan pemerintah dalam mengatasi konflik Aceh dengan model dialog tersebut terbukti berhasil dan secara drastis mengubah cara pandang dalam mengatasi konflik bersenjata yang terjadi di Indonesia kala itu. Perdamaian Aceh telah mendorong semua pihak untuk menahan diri dan mencoba saling memahami dan berinteraksi. Dulu musuh dan lawan, kini menjadi “kawan” atau saudara sebangsa dan setanah air. Setidaknya itu gambaran beberapa kali pertemuan Antara mantan-mantan tokoh elite GAM misalnya dengan pihak TNI-Polri maupun dengan para elite di Jakarta.

Setelah MoU Helsinki di tandatangani nyaris tidak “terdengar” baku tembak TNI-Polri dengan mantan GAM atau sebaliknya. TNI-Polri menahan diri atas situasi dan perkembangan sosial, politik, serta ekonomi yang terjadi. Tekanan internal dan eksternal menjadi salah satu penyebab mengapa TNI-Polri cenderung mengubah watak dan perilakunya di Aceh sehingga tindakan-tindakan yang dapat memicu timbulnya konflik tidak terjadi. Demikian pula dengan para mantan GAM, mereka di tuntutan oleh kondisi dan situasi agar senantiasa menjaga perilakunya.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan, kajian ini mencatat beberapa hal mendasar yang kemudian menjadi poin penting dalam konteks peran dan gagasan SBY dalam mengupayakan perdamaian Aceh. Pertama, keberhasilan upaya perdamaian Aceh yang di tempuh oleh pemerintahan SBY bermuara pada kesungguhan dan komitmen politik untuk benar-benar mengakhiri konflik. Kedua, kemampuan melihat peluang di tengah kesulitan dan keberanian mengambil keputusan terkait bencana tsunami membuka lebar pintu dialog yang sebelumnya telah tertutup. Ketiga, pilihan pendekatan yang non militeristik dan bertumpu pada dialog dan komunikasi politik informal dalam penyelesaian konflik Aceh pada gilirannya melahirkan kepercayaan dan komitmen dari pihak Indonesia dan GAM untuk berdamai. Keempat, keberanian dalam mengambil risiko dan realisasi kebijakan yang terukur dalam konteks merajut damai Aceh akhirnya membuahkan hasil yang menggembirakan. Terlepas dari poin-poin tersebut, penulis berpandangan bahwa komitmen perdamaian dari pihak pemerintah dan GAM menjadi poin penting dari realisasi perdamaian Aceh itu sendiri karena meski perjanjian damai telah disepakati, tetapi pemerintah ataupun GAM tidak berkomitmen untuk menjaga damai dengan cara mematuhi poin-poin perjanjian yang telah disepakati, maka perdamaian mungkin tidak berumur lama.

Kini, keberhasilan perdamaian di Aceh telah menjadi contoh utama tentang bagaimana mengakhiri konflik dengan pendekatan non militeristik dan sekaligus menjadi contoh dari kepemimpinan yang berkomitmen damai. Ketika semua pihak masih terpaku pada bencana tsunami, SBY telah berpikir mengenai peluang

perdamaian. Pada saat di mana elite politik sangat alergi dengan GAM, SBY justru mengambil risiko, mempertaruhkan kredibilitasnya, dan menempuh proses perdamaian baru dengan GAM.

Daftar Pustaka

- Amin, Khairul. 2018. "Pengaruh Konflik Terhadap Pembangunan Pendidikan Di Aceh." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 1(2):159-76. doi: 10.31538/nzh.v1i2.45.
- Barron, Patrick, Samuel Clark, and Muslahuddin Daud. 2005. *Conflict and Recovery in Aceh: An Assessment of Conflict Dynamics and Options for Supporting the Peace Process*.
- Desike, Vivin, Aprilia Audia, and Wardani Wardani. 2021. "Konflik Antar Masyarakat Etnis Jawa Di Desa Sukaraja Tiga Dan Masyarakat Etnis Lampung Di Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur." *SOCIAL PEDAGOGY: Journal of Social Science Education* 2(2):82. doi: 10.32332/social-pedagogy.v2i2.3517.
- Djalal, Dino Patti. 2008a. *Harus Bisa: Seni Memimpin Ala SBY*. Jakarta: Red & White Publishing.
- Djalal, Dino Patti. 2008b. "Mengubah Krisis Jadi Peluang." *Okezone News*. Retrieved November 27, 2022 (<https://news.okezone.com/read/2008/06/26/58/122308/mengubah-krisis-jadi-peluang>).
- Djumala, Darmansjah. 2013. *Soft Power Untuk Aceh: Resolusi Konflik Dan Politik Desentralisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gultom, Ferdi, and Agus Machfud Fauzi. 2021. "Demo Penolakan RUU Cipta Kerja Dalam Kacamata Teori Konflik Sosiologi." *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 4(1):53-67. doi: 10.31289/doktrina.v4i1.4868.
- Ikramatoun, Siti, and Khairul Amin. 2018. "Konstelasi Politik Aceh Pasca MoU Helsinki (2006-2015)." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 12(1):89-110.
- Ilham, Iromi. 2015. "Aceh Dalam Kuasa Awak Nanggroe (Studi Kemunculan Elit Baru Dari Kalangan Mantan Pejuang GAM Pasca Penandatanganan Nota Kesepahaman MoU Helsinki)." Universitas Gadjah Mada.
- Ishak, Otto Syamsuddin. 2013. *Aceh Pasca Konflik: Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*. Banda Aceh: Bandar Publishing.

- Jemadu, Aleksius. 2007. "Proses Peacebuilding Di Aceh: Dari MoU Helsinki Menuju Implementasi Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh." *Indonesian Journal of International Law* 3(4). doi: 10.17304/ijil.vol3.4.4.
- Kontras. 2006. *ACEH, DAMAI DENGAN KEADILAN? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*.
- Lee, Terence. 2020. "Political Orders and Peace-Building: Ending the Aceh Conflict." *Conflict, Security and Development* 20(1):115-39. doi: 10.1080/14678802.2019.1705071.
- Mahjuddin, Akhiruddin. 2012. "Dampak Konflik Terhadap Perkembangan Ekonomi Dan Tingkat Kesejahteraan Rakyat (Studi Kasus Aceh)." Universitas Indonesia.
- Marzuki, Nashrun, and Adi Warsidi, eds. 2011. *Fakta Bicara: Mengungkap Pelanggaran HAM Di Aceh 1989 - 2005*. Banda Aceh: Koalisi NGO HAM Aceh.
- Miftah Fauziyah. 2018. "Belajar Mengambil Keputusan." *Demokrat.or.Id*. Retrieved November 27, 2022 (<https://www.demokrat.or.id/belajar-mengambil-keputusan/>).
- Mudjiharto, Mudjiharto. 2020. "PERDAMAIAN ACEH PASCA BENCANA TSUNAMI ACEH 2004 DAN MOU HELSINKI: TELAHAH KRITIS DISASTER DIPLOMACY PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ACEH." *Jurnal Politik Profetik* 8(1):89-111. doi: 10.24252/profetik.v8i1a4.
- Nurhasim, Moch. 2007. "Strategi Penyelesaian Konflik Aceh." *Jurnal Demokrasi & HAM* 7(2):46-68.
- Sahlan, Muhammad, Iromi Ilham, Khairul Amin, and Ade Ikhsan Kamil. 2022. "Pendekatan Budaya Dalam Resolusi Konflik Politik Aceh: Suatu Catatan Reflektif." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 16(1):28-41. doi: 10.24815/jsu.v16i1.25272.
- Saprianingsih, Fatimah. 2011. "Resolusi Konflik Dan Gerakan Separatisme GAM Di Aceh Study Kasus Peran CMI Sebagai Mediator Konflik Antara Pemerintahan RI Dan GAM Di Aceh."
- Sodikin, Ali. 2013. "Kepemimpinan SBY Pada Bencana Tsunami, Perdamaian Aceh, Dan Kemenangan Partai Demokrat Pada Pemilu 2004 Dan 2009 H." Retrieved November 27, 2022 (https://www.kompasiana.com/alisodikin/552e2f236ea8348a198b4577/kepemimpinan-sby-pada-bencana-tsunami-perdamaian-aceh-dan-kemenangan-partai-demokrat-pada-pemilu-2004-dan-2009?page=1&page_images=1).
- Supriyanti, Nanik. 2006. *Ambiguitas Perdamaian : Pusat Penelitian Politik Year Book 2006*. Jakarta: LIPI Press.

- Sutrisno, Sutrisno, Sapriya Sapriya, Kokom Komalasari, and Rahmat Rahmat. 2021. "Pendidikan Kewarganegaraan Global Sebagai Resolusi Konflik Sosial." *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6(2):43-54. doi: 10.24269/jpk.v6.n2.2021.pp43-54.
- Tempo.co. 2021. "Farid Husain Sang Juru Damai Dalam Kenangan Jusuf Kalla - Obituari - Majalah.Tempo.Co." Retrieved November 27, 2022 (<https://majalah.tempo.co/read/obituari/162879/farid-husain-sang-juru-damai-dalam-kenangan-jusuf-kalla>).
- Usman, Abdul Rani. 2003. *Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi Dan Konflik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.